



2025-2029

RANCANGAN AKHIR RENSTRA

**DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**



**KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan strategis bagi kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan, guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas, peningkatan potensi pemuda, serta pengembangan olahraga yang berdaya saing. Penyusunan Renstra ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tidak lepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, baik dari jajaran pemerintah daerah, mitra pembangunan, hingga masyarakat luas. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi semua pihak dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif untuk menghadapi tantangan dan peluang di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, serta mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota yang lebih maju dan sejahtera.

Tarempa, 8 September 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA



TONY KARNAIN, Ph.D

Pembina Tk.I /IV.b

NIP. 19730602 200312 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	32
2.3 Penentuan Isu-isu Strategis	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
3.1 Tujuan Dan Sasaran	51
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mendukung Program Prioritas Nasional.....	53
3.3 Strategi Dan Kebijakan Dalam Mendukung Program Unggulan Pemerintah Daerah	57
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	61
4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	65
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	81
4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..	100
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.....	108
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	110
BAB V PENUTUP.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	23
Tabel 2. 2	24
Tabel 2. 3	25
Tabel 2. 4	26
Tabel 2. 5	28
Tabel 2. 6	30
Tabel 2. 7	31
Tabel 2. 8	37
Tabel 2. 9	38
Tabel 2. 10	48
Tabel 3. 1	52
Tabel 3. 2	58
Tabel 4. 1	66
Tabel 4. 2	82
Tabel 4. 3	101
Tabel 4. 4	109
Tabel 4. 5	111

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan visi kepala daerah, yaitu “Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera.” Visi ini mencerminkan tekad pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemuda, dan olahraga. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki peran strategis untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kreatif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan global.

Sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan, pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas memegang kunci penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau menjadi tantangan dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Selain itu, keberagaman budaya dan tradisi lokal di Anambas menjadi potensi yang harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan, sehingga dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang agamis dan berbudaya.

Dokumen Rancangan Akhir RPJPD dan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi panduan penting dalam penyusunan Renstra ini. Salah satu isu strategis yang diidentifikasi adalah perlunya penguatan kapasitas pemuda untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Dalam hal ini, pengembangan program kepemudaan yang berbasis inovasi, kewirausahaan dan kepemimpinan menjadi prioritas untuk menciptakan generasi muda yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Olahraga juga menjadi bagian penting dalam pembangunan SDM. Selain sebagai upaya membangun kesehatan masyarakat, olahraga juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan atlet berprestasi. Fasilitas olahraga yang memadai, pembinaan atlet yang berkesinambungan, serta dukungan kepada komunitas olahraga lokal menjadi fokus utama dalam pengembangan bidang olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Keterbatasan infrastruktur pendidikan, pemuda dan olahraga menjadi salah satu akar permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, misi kepala daerah untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan menjadi pijakan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung kemajuan sektor ini. Dukungan teknologi dan inovasi juga diharapkan mampu menjadi solusi atas tantangan geografis yang dihadapi.

Selain itu, misi untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan kemiskinan relevan dengan tanggung jawab dinas ini. Upaya menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, dan mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan menjadi prioritas strategis yang harus dicapai melalui program-program yang efektif dan berkelanjutan.

Integrasi kearifan lokal menjadi elemen penting dalam pelaksanaan program kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kearifan lokal tidak hanya menjadi sumber nilai untuk pembentukan karakter peserta didik, tetapi juga menjadi daya tarik untuk mendorong sektor pariwisata olahraga dan pemberdayaan pemuda berbasis komunitas. Dengan demikian, pembangunan SDM dapat dilakukan secara holistik, mencakup aspek intelektual, emosional, spiritual dan fisik.

Dalam menyusun Renstra ini, prinsip kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, menjadi landasan penting. Dukungan dari pemerintah

pusat, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program-program yang dirancang. Dengan semangat kolaborasi ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga optimistis mampu mewujudkan target-target pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Renstra ini disusun sebagai dokumen strategis yang memuat arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun ke depan. Dengan berlandaskan visi dan misi kepala daerah serta memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan masyarakat Anambas yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
2. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

7. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tentang Kerukunan Umat Beragama.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembauran Bangsa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pemantuan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 76).
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 105 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
24. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Tujuan

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang sesuai dengan isu-isu strategis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
2. Memastikan keterpaduan antara Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan nasional.
3. Menyediakan dasar perencanaan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diukur melalui indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*).
4. Membangun sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai stabilitas politik, harmoni sosial, dan penguatan persatuan bangsa.
5. Mengadaptasi rencana kerja organisasi dengan perkembangan kondisi lokal, nasional, dan global untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

6. Menjadi acuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada setiap siklus perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

Menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, analisis kondisi dan capaian pelayanan, permasalahan dan tantangan, serta identifikasi isu-isu strategis. Bab ini mencakup analisis deskriptif dan diagnostik terhadap capaian pelayanan PD serta identifikasi isu global, nasional, dan regional yang relevan seperti perubahan iklim dan digitalisasi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang merupakan cascading dari tujuan RPJMD. Bab ini juga menguraikan strategi dan arah kebijakan, termasuk strategi operasional dan penahapan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

Menjelaskan tentang program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, lengkap dengan indikator kinerja (IKU/IKK), target, dan pagu indikatif. Bab ini berfokus pada program prioritas

daerah dan dukungan terhadap 83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Sebagai perangkat daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

5. Pengelolaan barang milik daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

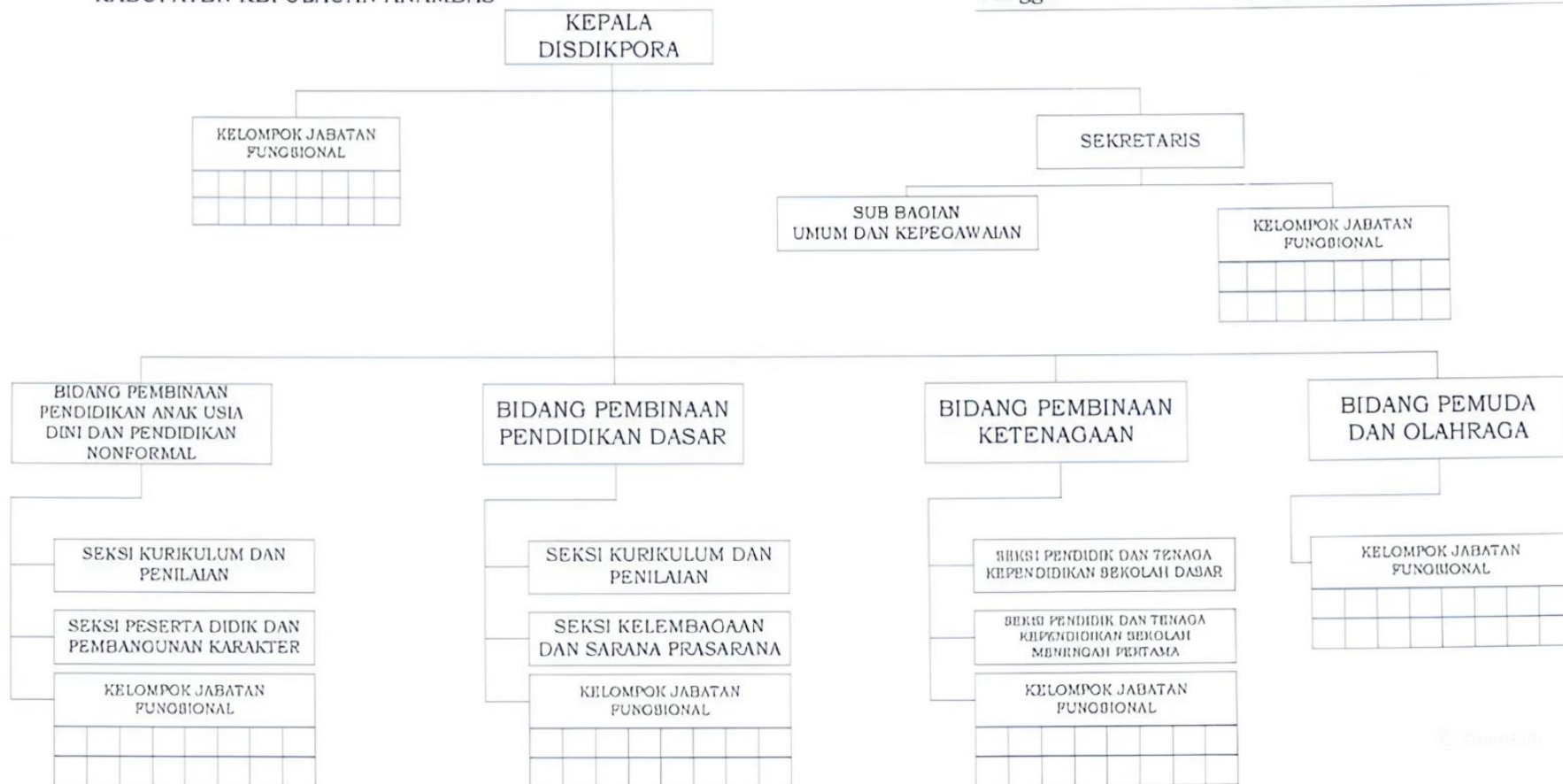
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
6. Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Lebih lanjut Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
 Nomor : 53 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021



Tugas dan Fungsi Masing-Masing Struktur dalam Susunan Organisasi:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DISDIKPORA.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DISDIKPORA;
- b. Koordinasi kegiatan DISDIKPORA;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi DISDIKPORA;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DISDIKPORA.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi internal DISDIKPORA;
- b. Melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. Menangani pengaduan terkait pelayanan DISDIKPORA;
- d. Menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. Menyusun perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pembinaan jabatan fungsional, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. Melaksanakan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DISDIKPORA;
- h. Memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DISDIKPORA;
- i. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasaran, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasaran, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

- h. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DISDIKPORA.

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Kurikulum dan Penilaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi kurikulum dan penilaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengajar, dan evaluasi belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil evaluasi belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. Menyediakan buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku perpustakaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. Menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. Melaksanakan pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- i. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi murid pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- k. Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- l. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- m. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- n. Penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar dan kurikulum muatan lokal, satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- o. Pengawasan pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- p. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kurikulum, bahan belajar dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- q. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi kurikulum dan penilaian; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi peserta didik dan pembangunan karakter;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan

- pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi peserta didik dan pembangunan karakter; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan dasar; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DISDIKPORA.

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Kurikulum dan Penilaian, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- b. Menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra Daerah yang penuturnya dalam Daerah;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi kurikulum dan penilaian; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya;

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

5. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- g. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- h. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pembinaan ketenagaan; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala disdikpora.

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Pendidikan Menengah Pertama; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaa kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

6. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala disdikpora.

Susunan Organisasi Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- 1. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya.
- 2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya.

3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku.
4. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya.
5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;.

Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Per Januari 2025 berjumlah 34 (tiga puluh tiga) Orang terdiri dari 33 Pegawai Negeri Sipil dan 1 Pegawai dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina TK.I	Eselon II.b	1 Orang
Pembina	Eselon III.a	1 Orang
Pembina	Eselon III.b	2` orang
Penata TK.I	Eselon III.b	1 Orang
Penata Tk. I	Eselon IVa	3 Orang
Penata	Eselon IV.a	3 Orang
Penata Muda TK.I	Eselon IV.a	1 Orang
Penata TK I	Staf	3 Orang
Penata	Staf	1 Orang
Penata Muda TK.I	Staf	3 Orang
Penata Muda	Staf	11 Orang
Pengatur TK I	staf	2 Orang

Pengatur	Staf	3 Orang
PPPK	Staf	47 Orang
Jumlah		82 Orang

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di dominasi oleh PNS yang berjumlah 34 orang sedangkan P3K berjumlah 1 Orang yang terdiri dari jabatan eselon II.b berjumlah 1 orang, eselon III.a berjumlah 1 orang, eselon III.b berjumlah 3 orang, eselon IV.a berjumlah 7 orang dan staf berjumlah 22 orang.

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	P N S : 33 Orang	S3 : 1 Orang
		S2 : 1 Orang
		S1 : 28 Orang
		SMA/SMK : 5 Orang
2	PPPK : 1 Orang	S1 : 20 Orang
		D3 : 1 Orang
		SMA/SMK : 26
		SMP/SLTP : -
		SD : -
Jumlah		82 Orang

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari PNS dan PPPK, berikut ini sumber daya aparatur PNS dan PPPK berdasar kelamin.

Tabel 2. 3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
PNS	17	18
PPPK	25	23
Jumlah	41	41

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Namun, saat ini terdapat tantangan yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan ASN yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direncanakan pada tahun 2025. Perekrutan P3K ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, terutama pada unit kerja yang membutuhkan tenaga ahli. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga tetap menjadi perhatian, mengingat proporsi aparatur perempuan saat ini sudah cukup memadai. Dengan memastikan keterwakilan gender yang proporsional, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

Tak kalah penting, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
A	Sarana		
1	Gedung Kantor	1	2021
B	Prasarana		
1	Mobil Dinas	3	2021
2	Kaisar	1	2021
3	Sepeda Motor	13	2021
4	Speed Boat/ Motor Tempel	4	2021
5	Laptop Apple Macbook Air	5	2021
6	Laptop Asus Notebook A407UF – BV51 1T	10	2021
7	Laptop FUJITSU LH531	3	2021
8	Laptop Lenovo V310-14ISK	7	2021
9	PC Lenovo	2	2021
10	Printer	14	2021

d. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan cerminan dari kemampuan instansi dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya, yakni menjaga persatuan, harmoni, dan stabilitas sosial-politik di tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan meliputi fasilitasi kegiatan politik, pembinaan organisasi masyarakat, penguatan wawasan kebangsaan, serta mediasi konflik sosial. Dalam pelaksanaannya, kinerja pelayanan ini sangat bergantung pada kualitas

sumber daya manusia dan optimalisasi peran ASN di setiap unit kerja. Pendekatan yang bersifat koordinatif dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh program dan kebijakan berjalan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kinerja pelayanan juga didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas seperti ruang kerja, teknologi informasi, dan perlengkapan administrasi memainkan peran penting dalam mempercepat proses pelayanan. Dengan pemanfaatan teknologi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan data dan penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi kinerja secara berkala juga dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan, sehingga kualitas pelayanan terus meningkat dan mampu menjawab tantangan dinamika sosial-politik yang berkembang.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu:

Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pendidikan				61,38	63,27	65,17	67,06	68,96	70,85	60,41	60,41	67,37	59,6			95,47	95,47	103%	88,87%		
2	Indeks Rata-rata Lama Sekolah				49,2	50,6	52	53,4	54,8	56,2	49,2	49,2	49,33	50,2			97,23	97,23	57,13%	94%		
3	Indeks harapan lama sekolah				73.56	75.94	78.33	80.72	83.11	85.5	71,61	71,61	85,41	169%			94,29	94,29	109%	85,48%		
4	Tingkat Partisipasi dan prestasi dalam kepemudaan, olahraga dan kepramukaan				60	69.7	74.81	83.96	88.07	100	369	369	42%	43%			529	529		51,21%		
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan				60	68	80	88	92	100	291	291	9,40%	28,62			427	427	11,75	32,52%		
6	Prestasi olahraga				66.67	77.78	77.78	88.89	88.89	100	70	70	15,38	0%			89,9	89,9	19,74	0%		
7	Tingkat partisipasi kepramukaan				53	63	67	75	83	100	75	75	100%	100%			119	119	149%	100%		
8	Indeks reformasi birokrasi				CC (51,76)	CC (53)	B (60,02)	B (67)	BB (71)	BB (75)	CC (53)	CC (53)	0	-			CC (53)	CC (53)	0	-		
9	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan(AKIP)Disdikpora KkA				CC	CC	B	B	BB	BB	CC (55)	CC (55)	B (69,66%)	BB (71,80)			CC (55)	CC (55)	110%	106%		
10	Indeks Kepuasan Masyarakat				C	B	B	B	A	A	B(82)	B(82)	B(85)	B(86,8)			B(82)	B(82)	103%	105%		
					-75	-81	-82	-83	-84	-88												
11	Persentase pemenuhan pembangunan/ renovasi/rehabilitasi (100 rumah)				10	30	50	75	90	100	6	6	3	14			20	20	6%	18,70%		
12	Persentase pembangunan yang dilakukan				0	20	40	60	80	100	6	6	2	1			30	30	5%	2%		
13	Persentase renovasi/rehabilitasi yang dilakukan				10	25	45	70	85	100	-	-	1	13			-	-	2%	18,58%		

Berdasarkan data capaian kinerja, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menunjukkan tren positif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi strategisnya. Pada indikator *Nilai Reformasi Birokrasi*, terlihat adanya target peningkatan yang konsisten dari B(67) pada tahun 2024 hingga mencapai 75 pada tahun 2026. Hal yang sama juga terlihat pada indikator *Nilai AKIP*, dengan target bertahap dari B(68) di tahun 2024 menjadi BB(78) pada tahun 2026. Capaian ini mencerminkan upaya instansi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, selaras dengan tujuan reformasi birokrasi nasional. Di sisi lain, *Indeks Kepuasan Masyarakat* sebagai tolok ukur kualitas pelayanan juga menunjukkan target yang meningkat secara bertahap dari B(83) pada tahun 2024 menjadi A(88) pada tahun 2026.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yaitu:

Tabel 2. 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	Rp2.025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 155.867.290.134,00	Rp 144.008.309.328,00	Rp 235.485.620.276,00	Rp 185.130.606.227,00	Rp 186.795.160.053,78	Rp 187.674.882.326,00	Rp 134.674.581.777,00	Rp 142.940.121.474,00	Rp 161.990.223.751,00	Rp 166.256.377.108,00			86,40	99,26	90,05	89,8				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 63.501.777.290,00	Rp 50.675.351.462,00	Rp 55.180.588.813,00	Rp 47.031.091.286,00	Rp 46.632.867.720,15	Rp 30.682.083.700,00	Rp 31.124.129.059,00	Rp 48.765.744.033,00	Rp 38.358.674.268,00	Rp 18.885.738.184,00			49,01	96,22	69,51	40,16				
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.040.307.000,00	Rp 597.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			0,00	0	0	0				
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 176.106.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 190.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			0,00	0	0	0				
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp -	Rp -	Rp 40.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 170.710.500,00	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 24.946.000,00	Rp 47.812.500,00			0,00	0	62,37	79,69				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 137.874.937,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 95.549.587,00			0,00	0	0	69,3				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 492.991.500,00	Rp 953.475.043,00	Rp 259.095.400,00	Rp 331.013.380,00	Rp 815.845.329,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp 177.366.000,00	Rp 907.238.535,00	Rp 121.955.000,00	Rp 253.371.680,00			35,98	95,15	47,07	76,54				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 5.449.918.776,00	Rp 1.423.696.881,00	Rp 6.719.527.598,00	Rp 3.797.776.696,00	Rp 8.007.102.517,77	Rp 3.697.724.433,00	Rp 3.444.085.279,00	Rp 1.052.798.711,00	Rp 3.590.209.624,00	Rp 2.547.410.457,00			63,2	73,95	53,43	67,08				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 583.725.600,00	Rp 200.044.161,00	Rp 1.075.847.836,00	Rp 242.650.181,00	Rp 585.383.110,00	Rp 200.000.000,00	Rp 146.744.200,00	Rp 189.052.240,00	Rp 523.287.900,00	Rp 209.350.800,00			25,14	94,51	48,64	86,28				

Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas adalah seluruh satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan peserta didik yang tersebar di 10 kecamatan. Berdasarkan data tahun 2024, berikut adalah distribusi satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan peserta didik di Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 2. 7
Distribusi Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	PAUD			SD			SMP		
		Jlh Sekolah	Jlh Guru	Jlh Siswa	Jlh Sekolah	Jlh Guru	Jlh Siswa	Jlh Sekolah	Jlh Guru	Jlh Siswa
1	Siantan	15	49	505	10	136	1326	6	73	671
2	Palatak	13	55	452	8	87	781	4	35	493
3	Siantan Timur	7	24	208	10	81	492	3	28	192
4	Siantan Selatan	7	21	131	8	65	411	6	49	186
5	Jemaja Timur	4	13	117	4	35	313	1	14	107
6	Jemaja	5	25	217	9	89	725	2	30	326
7	Siantan Tengah	8	30	176	7	71	357	2	28	161
8	Siantan Utara	3	8	58	5	23	242	2	34	103
9	Jemaja Barat	3	10	46	3	21	89	1	8	40
10	Kute Siantan	5	21	141	4	50	320	-	-	-
Jumlah		70	256	2051	68	658	5054	27	299	2279

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis beberapa poin penting terkait kelompok sasaran pelayanan:

1. Distribusi Satuan Pendidikan:

- Total terdapat 165 satuan pendidikan yang terdiri dari 70 PAUD, 68 SD, dan 27 SMP.
- Kecamatan Siantan memiliki jumlah satuan pendidikan terbanyak dengan total 31 sekolah (15 PAUD, 10 SD, dan 6 SMP).
- Kecamatan Kute Siantan belum memiliki satuan pendidikan tingkat SMP.

2. Distribusi Tenaga Pendidik:

- a. Total tenaga pendidik di Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 1.213 guru yang terdiri dari 256 guru PAUD, 658 guru SD, dan 299 guru SMP.
- b. Rasio guru terhadap satuan pendidikan pada jenjang PAUD adalah 3,7 guru per sekolah, pada jenjang SD adalah 9,7 guru per sekolah, dan pada jenjang SMP adalah 11,1 guru per sekolah.
- c. Kecamatan dengan jumlah tenaga pendidik terbanyak adalah Kecamatan Siantan dengan total 258 guru.

3. Distribusi Peserta Didik:

- a. Total peserta didik di Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 9.384 siswa yang terdiri dari 2.051 siswa PAUD, 5.054 siswa SD, dan 2.279 siswa SMP.
- b. Rasio siswa terhadap guru pada jenjang PAUD adalah 8,0 siswa per guru, pada jenjang SD adalah 7,7 siswa per guru, dan pada jenjang SMP adalah 7,6 siswa per guru.
- c. Kecamatan dengan jumlah peserta didik terbanyak adalah Kecamatan Siantan dengan total 2.502 siswa.

Kelompok sasaran ini menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan identifikasi tantangan yang akan dihadapi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan, terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari banyak pulau menciptakan tantangan signifikan dalam penyediaan fasilitas pendidikan secara merata dan efektif. Transportasi

antar-pulau yang terbatas turut memengaruhi distribusi logistik pendidikan, termasuk buku, perangkat teknologi, dan perlengkapan sekolah, sehingga menghambat pemerataan akses pendidikan berkualitas.

Dari sisi infrastruktur pendidikan, banyak sekolah masih menghadapi kekurangan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur penunjang lainnya. Beberapa sekolah di daerah terpencil bahkan masih menggunakan bangunan semi permanen yang rawan rusak, sehingga mengganggu proses belajar mengajar yang kondusif. Permasalahan juga terjadi pada distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, di mana guru cenderung terpusat di wilayah perkotaan, sedangkan daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga pengajar. Kesenjangan kompetensi guru, terutama dalam penggunaan teknologi dan pengajaran berbasis kurikulum Merdeka Belajar, juga menjadi tantangan tersendiri.

Keterbatasan teknologi dan digitalisasi menjadi hambatan serius, terutama akses internet yang tidak merata di daerah terpencil serta rendahnya literasi digital pada siswa, guru, dan orang tua. Hal ini menghambat penerapan teknologi pendidikan yang seharusnya dapat menjadi solusi bagi keterbatasan geografis. Dari segi pendanaan, anggaran pendidikan dari APBD yang belum mencapai 20% menyebabkan banyak program prioritas tidak dapat berjalan optimal, ditambah dengan minimnya kemitraan dengan sektor swasta atau pihak luar untuk mendukung pengembangan pendidikan.

Ketimpangan mutu pendidikan juga terlihat dari tingkat literasi dan numerasi siswa di beberapa daerah yang masih rendah dibandingkan rata-rata nasional, serta implementasi kurikulum yang relevan dengan kearifan lokal belum optimal. Faktor sosial dan budaya turut memengaruhi, di mana pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih beragam, terutama di komunitas terpencil. Masalah seperti kekerasan, bullying, intoleransi, dan pelecehan anak di sekolah juga menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus.

Dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan, minimnya fasilitas olahraga di sekolah-sekolah serta rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pendidikan informal dan pengembangan keterampilan menjadi permasalahan yang harus diatasi. Perubahan kebijakan nasional seperti penerapan Kurikulum Merdeka dan digitalisasi pendidikan memerlukan penyesuaian yang signifikan, sementara upaya pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) memerlukan sumber daya yang lebih besar. Faktor eksternal seperti perubahan iklim yang menyebabkan daerah rawan bencana seperti banjir rob dapat memengaruhi aktivitas pendidikan di pulau-pulau kecil, serta fenomena urbanisasi yang mengurangi jumlah siswa di beberapa sekolah kecil di desa.

Tantangan-tantangan tersebut memerlukan strategi yang tepat, termasuk pendekatan inovatif berbasis teknologi, penguatan kolaborasi dengan masyarakat, serta alokasi anggaran yang lebih fokus pada daerah terpencil untuk memastikan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, dan peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi, kejadian, atau fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

- Belum optimalnya data dan informasi sebagai basis pengambilan keputusan, terutama terkait pendidikan di wilayah terpencil.
- Belum optimalnya pelibatan pemangku kepentingan lokal dalam penyusunan kebijakan.
- Belum optimalnya kemampuan adaptasi terhadap kebijakan nasional, seperti Kurikulum Merdeka dan digitalisasi pendidikan.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

- Fragmentasi antar-unit kerja yang menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program.
- Kurangnya mekanisme evaluasi yang terintegrasi untuk memastikan sinkronisasi kebijakan di seluruh jenjang pendidikan dan pemuda.
- Hambatan geografis dalam pelaksanaan koordinasi secara langsung di seluruh wilayah kepulauan.

3. Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Administrasi

- Prosedur administrasi yang belum sepenuhnya terstandarisasi, terutama di tingkat satuan pendidikan.
- Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola tugas administrasi secara efektif dan efisien.
- Sistem administrasi berbasis teknologi belum diterapkan secara menyeluruh.

4. Koordinasi Pelaksanaan Supervisi dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

- Supervisi terhadap satuan pendidikan, pemuda, dan olahraga masih belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya pengawas.
- Kurangnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan.
- Pengawasan atas implementasi kebijakan masih lemah, terutama di daerah terpencil.

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Inventarisasi barang milik daerah, seperti fasilitas pendidikan dan olahraga, belum akurat atau terintegrasi.
- Kurangnya pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur dan peralatan, sehingga banyak aset yang mengalami kerusakan.
- Belum optimalnya pemanfaatan aset pendidikan, pemuda, dan olahraga untuk mendukung kegiatan masyarakat.

6. Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

- Keterbatasan tenaga pengawas yang kompeten untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana.
- Belum adanya sistem pengawasan berbasis teknologi yang mempermudah monitoring dan evaluasi secara *real-time*.
- Masih ada praktik yang tidak sesuai prosedur, terutama dalam pengelolaan anggaran atau pelaksanaan program.

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

- Beban tugas tambahan dari Bupati sering kali tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai.
- Kurangnya fleksibilitas dalam anggaran dan waktu untuk melaksanakan tugas tambahan.
- Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan fungsi tambahan sering kali mengalami hambatan, terutama dengan OPD lain.

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas Pendidikan Rendah	Masih rendahnya kemampuan numerasi siswa terutama siswa Sekolah dasar	Kurangnya akses ke fasilitas pendidikan yang memadai dan kurangnya pelatihan guru berbasis kompetensi
2	Distribusi Tenaga Pendidik Tidak Merata	Kekurangan guru di daerah terpencil	Guru enggan ditempatkan di wilayah terpencil karena minimnya fasilitas pendukung
3	Infrastruktur Pendidikan Kurang Memadai	Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas yang layak, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium	Keterbatasan anggaran daerah dan sulitnya distribusi logistik ke wilayah kepulauan
4	Minimnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Rendahnya program pengembangan keterampilan dan kepemimpinan pemuda	Kurangnya perhatian terhadap program khusus pemuda dan minimnya fasilitas untuk kegiatan kepemudaan
5	Kurangnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Fasilitas olahraga di sekolah dan masyarakat tidak memadai	Tidak adanya alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan sarana olahraga
6	Supervisi dan Pengawasan yang Lemah	Rendahnya efektivitas monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan	Keterbatasan tenaga pengawas dan sistem pengawasan berbasis teknologi
7	Digitalisasi Pendidikan Belum Optimal	Rendahnya adopsi teknologi dalam proses pembelajaran	Keterbatasan jaringan internet dan kurangnya pelatihan guru terkait teknologi pendidikan

Selain permasalahan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus:

- Banyaknya guru yang belum memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar di sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas
- Belum tersedianya anggaran untuk kegiatan peningkatan mutu di satuan pendidikan melalui kegiatan penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik untuk jenjang SD
- Masih maraknya kekerasan dan pembulian/perundungan, kenakalan remaja
- Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan oleh orang tua sehingga masih terdapat anak yang putus sekolah

Telaahan Visi, Misi, dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima tahun ke depan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu:

"Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera"

Tabel 2. 9
Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah

No	Misi	No	Program Unggulan
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;	1.	Program Zero Buta Huruf
		2.	Program Bantuan Perlengkapan Sekolah SD-SMP
		3.	Program Rumah Tahfidz
		4.	Program Insentif Guru Ngaji, Imam Mesjid dan Marbot Mesjid
		5.	Program Beasiswa Perguruan Tinggi
		6.	Program Sertifikasi dan Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)

		7.	Program Pembangunan Anjungan Kebudayaan
		8.	Program Event Kebudayaan
2.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	9.	Program Memangkas Rentang Kendali (Akses Transportasi)
		10.	Program Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan
3.	Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;	11.	Program Menaikan Alokasi Dana Desa (ADD)
		12.	Pembentukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Disesuaikan dengan Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
		13.	Program Optimalisasi Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
4.	Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata;	14.	Program Tangkap Olah Jual (TOJ) dan Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		15.	Program Hilirisasi Perikanan (Industrialisasi)
		16.	Program Anambas Rest Area dan Ciptakan Destinasi Wisata Baru
5.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan	17.	Program UMKM Naik Kelas
		18.	Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lansia
		19.	Program BPJS Tenaga Kerja Untuk Nelayan, Petani dan Buruh Lepas

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdapat pada Misi Pertama yaitu "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Luhur".

Misi ini menjadi landasan utama bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun rancangan strateginya. Penekanan pada peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya menjadi arah kebijakan yang sangat relevan dengan tugas pokok dan fungsi Disdikpora.

Analisis Program Unggulan Pada Misi Pertama Kepala Daerah:

1. Program Zero Buta Huruf

Program Zero Buta Huruf merupakan program unggulan yang bertujuan untuk menuntaskan permasalahan buta huruf di Kabupaten Kepulauan Anambas. Implementasi program ini dalam rancangan strategi Disdikpora dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kondisi Eksisting:

- a. Masih terdapat kantong-kantong buta huruf terutama di pulau-pulau terpencil
- b. Keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terisolasi
- c. Angka partisipasi pendidikan orang dewasa yang relatif rendah di beberapa kecamatan

Penerapan dalam Rancangan Strategi:

- a. Pemetaan dan Pendataan:
 - o Melakukan pemetaan komprehensif penduduk buta huruf di seluruh pulau
 - o Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk monitoring perkembangan program
- b. Pengembangan Model Pembelajaran:
 - o Merancang metode pembelajaran keaksaraan fungsional yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat kepulauan
 - o Mengembangkan modul pembelajaran kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir
- c. Penguatan Kelembagaan:
 - o Membentuk pusat kegiatan belajar masyarakat di setiap desa/kelurahan
 - o Merevitalisasi peran Balai Pengajian dan Masjid sebagai pusat pembelajaran keaksaraan

d. Mobilisasi Sumber Daya:

- Merekrut dan melatih tutor lokal dari masyarakat setempat
- Melibatkan mahasiswa dalam program KKN tematik pemberantasan buta huruf

e. Monitoring dan Evaluasi:

- Mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mengukur capaian program
- Melakukan evaluasi berkala untuk penyesuaian strategi implementasi

Target Capaian:

- Menurunkan angka buta huruf.
- Meningkatkan tingkat literasi fungsional masyarakat di seluruh kecamatan
- Menciptakan masyarakat pembelajar sepanjang hayat di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Program Bantuan Perlengkapan Sekolah PAUD, SD dan SMP

Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap siswa PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki akses terhadap perlengkapan sekolah yang memadai, sehingga dapat menunjang proses belajar mereka.

Kondisi Eksisting:

- Tingginya biaya pendidikan terutama untuk perlengkapan sekolah bagi keluarga prasejahtera
- Disparitas kualitas pendidikan antar sekolah di pulau utama dengan pulau terpencil

Penerapan dalam Rancangan Strategi:

1. Identifikasi Kebutuhan:

- Melakukan pemetaan komprehensif kebutuhan perlengkapan sekolah di seluruh PAUD, SD dan SMP
- Mengidentifikasi siswa dari keluarga prasejahtera yang membutuhkan bantuan prioritas

2. Pengembangan Mekanisme Distribusi:

- Merancang sistem distribusi yang efektif untuk menjangkau sekolah-sekolah di pulau terpencil
- Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta untuk dukungan logistik

3. Penguatan Komitmen Stakeholder:

- Melibatkan peran komite sekolah dalam pengelolaan dan pengawasan program
- Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam program adopsi sekolah

4. Diversifikasi Bantuan:

- Memberikan bantuan seragam, sepatu, tas, dan alat tulis
- Menyediakan buku pelajaran dan penunjang untuk perpustakaan kelas
- Mengembangkan kit pembelajaran praktik untuk mata pelajaran sains dan keterampilan.

Target Capaian:

- Seluruh siswa dari keluarga prasejahtera mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah
- Menurunkan tingkat putus sekolah di tingkat SD dan SMP hingga di level terbawah.
- Meningkatkan kehadiran siswa di sekolah terutama di daerah terpencil.

Analisis Isu Strategis Pendidikan Daerah dan Strategi Kebijakan Berbasis Program Prioritas Nasional

Dalam upaya memperkuat arah pembangunan pendidikan di daerah, sinkronisasi antara kebijakan lokal dengan program prioritas nasional menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melakukan kajian dapat mengidentifikasi isu-isu strategis dan merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat terkait isu eksternal yang bersumber dari program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta arah kebijakan konkret yang diambil untuk menjawab tantangan tersebut.

Isu Strategis Berdasarkan Program Prioritas Kemendikdasmen

1. Revitalisasi Sekolah

Revitalisasi sekolah tidak hanya sebatas perbaikan fisik gedung, tetapi juga menyentuh aspek manajemen anggaran dan pemetaan kebutuhan. Tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sesuai urgensi kerusakan atau kebutuhan paling mendesak. Hal ini menuntut adanya pemetaan akurat, survei lapangan, serta sistem prioritas berbasis data, sehingga revitalisasi memberikan dampak signifikan terhadap mutu pembelajaran.

2. Digitalisasi Pembelajaran

Perkembangan teknologi menuntut pendidikan bertransformasi menuju ekosistem digital. Namun, daerah masih menghadapi tantangan besar, antara lain:

- Kesenjangan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil dan blank spot.
- Literasi digital guru dan siswa yang belum merata.
- Konten digital pendidikan yang masih terbatas dan belum sesuai konteks lokal.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan jaringan internet, perangkat TIK, serta pelatihan intensif bagi guru agar mampu memanfaatkan teknologi sebagai instrumen pembelajaran efektif.

3. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Keadilan akses pendidikan harus tercermin dalam proses penerimaan siswa baru. Tantangan yang muncul antara lain ketidakmerataan daya tampung sekolah, sistem pendataan calon siswa yang belum optimal, serta risiko pungutan liar dan gratifikasi. Oleh karena itu, strategi berbasis pendaftaran daring, integrasi data lintas sektor, dan sosialisasi masif menjadi langkah yang harus diperkuat.

4. Wajib Belajar 13 Tahun

Kebijakan wajib belajar menargetkan agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Namun, angka putus sekolah (ATS) masih menjadi tantangan, khususnya karena faktor ekonomi, budaya, serta kondisi sosial. Banyak anak yang sudah masuk dunia kerja enggan kembali bersekolah, sementara anak disabilitas masih menghadapi hambatan penerimaan sosial. Kebijakan harus diarahkan pada pendidikan kesetaraan, beasiswa, serta dukungan inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama.

5. Penguatan Pendidikan Karakter

Di era digital, siswa rentan terpapar pengaruh negatif dari media dan lingkungan sosial. Minimnya pengawasan orang tua semakin memperparah kondisi ini. Oleh sebab itu, pendidikan karakter harus diperkuat melalui pembiasaan nilai-nilai moral di sekolah, keterlibatan orang tua, serta regulasi pemerintah daerah seperti jam malam belajar dan kegiatan keagamaan.

6. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program MBG merupakan salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa. Tantangan utamanya meliputi:

- Distribusi logistik di wilayah kepulauan yang sering terhambat cuaca dan transportasi.
- Keterbatasan infrastruktur sekolah, seperti dapur dan ruang makan.
- Kurangnya SDM terlatih dalam manajemen program gizi.

Untuk itu, dibutuhkan sistem distribusi yang efisien, fasilitas sekolah yang memadai, serta pelatihan bagi tenaga kependidikan.

7. Pembelajaran Mendalam dan Penjaminan Mutu

Isu mutu pendidikan tidak hanya terkait ketersediaan fasilitas, tetapi juga kompetensi guru, manajemen sekolah, serta budaya mutu. Tantangan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman penjaminan mutu, belum optimalnya pemanfaatan rapor mutu pendidikan dalam penyusunan anggaran sekolah, serta lemahnya peran kepala sekolah sebagai agen perubahan. Upaya peningkatan mutu harus berbasis data, berorientasi pada pengembangan metode pembelajaran mendalam, dan diperkuat dengan kolaborasi bersama orang tua.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas 2023-2043 menjadi landasan utama dalam pengelolaan ruang untuk mendukung pembangunan sektor pendidikan, pemuda, dan olahraga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6 bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya

Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Dalam konteks pendidikan, pemuda, dan olahraga, RTRW menekankan bahwa:

- Zonasi pendidikan harus dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan prioritas pada wilayah terpencil dan terluar
- Pengembangan fasilitas olahraga harus ditempatkan di pusat kegiatan lokal yang strategis
- Konektivitas infrastruktur seperti akses jalan dan transportasi publik ke fasilitas pendidikan dan olahraga menjadi elemen krusial
- Semua pembangunan harus memastikan tidak melanggar kawasan lindung dan tetap menghormati tata ruang budidaya yang telah ditetapkan

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memastikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Beberapa aspek penting dalam KLHS yang terkait dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi:

- Setiap pembangunan wajib melalui evaluasi dampak lingkungan, terutama untuk memastikan bahwa kawasan sensitif seperti daerah lindung, pesisir, atau ekosistem kritis tidak terganggu
- Kebijakan keberlanjutan perlu diintegrasikan melalui pendekatan pendidikan, seperti memasukkan materi tentang pelestarian lingkungan ke dalam kurikulum formal di sekolah
- Hasil KLHS menjadi dasar pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada

kebutuhan saat ini tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan bagi generasi mendatang

2.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis ini menjadi panduan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam merumuskan program kerja yang relevan dan berkelanjutan. Isu-isu strategis ini mencakup berbagai dimensi, dari pengelolaan internal hingga adaptasi terhadap tantangan eksternal. Untuk menghadapi isu tersebut, diperlukan pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berbasis data yang memperhatikan karakteristik daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga diharapkan mampu mendukung tercapainya visi daerah menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah isu-isu strategis yang akan dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas selama 5 tahun ke depan (2025-2029):

Tabel 2. 10

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah pertama di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas	1. Distribusi tenaga pendidik tidak merata, terutama di daerah terpencil. 2. Infrastruktur pendidikan yang masih kurang memadai. 3. Rendahnya kemampuan numerasi dan literasi siswa. 4. Minimnya akses pendidikan berkualitas di pulau-pulau kecil.	Perlindungan kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim untuk keberlangsungan fasilitas pendidikan	Persaingan tenaga kerja global dan kebutuhan keterampilan abad 21	Implementasi Kurikulum Merdeka dan digitalisasi pendidikan nasional	Ketimpangan mutu pendidikan antar wilayah kepulauan di provinsi Kepulauan Riau	1. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil 2. Penguatan infrastruktur pendidikan berbasis kondisi geografis kepulauan
Pengembangan ekosistem digital pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas	1. Keterbatasan akses internet di daerah terpencil 2. Rendahnya literasi digital guru, siswa, dan orang tua 3. Minimnya perangkat teknologi pendidikan 4. Belum optimalnya sistem administrasi berbasis teknologi	Efisiensi energi dalam pengembangan infrastruktur digital pendidikan	Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 serta transformasi digital global	Program digitalisasi pendidikan nasional dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)	Kesenjangan infrastruktur digital antar kabupaten/kota di Kepulauan Riau	Akselerasi digitalisasi pendidikan dan peningkatan literasi digital bagi pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik
Pengelolaan dan pengembangan SDM pendidik dan tenaga kependidikan	1. Keterbatasan kompetensi guru, terutama dalam penguasaan teknologi 2. Kurangnya guru di wilayah terpencil 3. Minim pelatihan berbasis kurikulum Merdeka Belajar 4. Supervisi dan pengawasan yang belum optimal	Tidak ada isu KLHS spesifik yang teridentifikasi	Standar kompetensi pendidik internasional	Penerapan kebijakan Guru Penggerak dan peningkatan kualifikasi guru	Pemerataan guru berkualitas di wilayah kepulauan	Peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga pendidik
Pembinaan kepemudaan dan pengembangan kewirausahaan	1. Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pendidikan informal	Pemanfaatan sumber daya lokal berkelanjutan untuk	Kompetisi global di sektor ekonomi kreatif	Kebijakan nasional pengembangan kewirausahaan pemuda	Mobilitas tenaga kerja muda antar wilayah kepulauan	Pemberdayaan pemuda dan pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal

	2. Minimnya program pengembangan keterampilan dan kepemimpinan pemuda 3. Kurangnya fasilitas kepemudaan 4. Belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi kreatif pemuda	pengembangan kewirausahaan pemuda				
Pembinaan dan pengembangan olahraga	1. Minimnya fasilitas olahraga di sekolah dan masyarakat 2. Kurangnya pembinaan atlet secara sistematis 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga 4. Tidak meratanya distribusi pelatih berkualitas	Pengembangan fasilitas olahraga yang ramah lingkungan	Standar fasilitas dan pembinaan olahraga internasional	Program nasional Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan kebijakan pembinaan olahraga prestasi	Kompetisi olahraga tingkat provinsi dan antar kabupaten	Pengembangan sarana prasarana olahraga dan peningkatan prestasi atlet
Pengelolaan anggaran dan aset pendidikan	1. Anggaran pendidikan yang belum mencapai 20% dari APBD 2. Inventarisasi barang milik daerah belum akurat 3. Kurangnya pemeliharaan rutin terhadap aset 4. Minimnya kemitraan dengan sektor swasta	Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan berkelanjutan	Standar pendanaan pendidikan internasional	Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Kesenjangan pendanaan pendidikan antar kabupaten di provinsi	Optimalisasi pengelolaan anggaran dan aset pendidikan
Tata kelola pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga	1. Belum optimalnya data dan informasi sebagai basis pengambilan keputusan 2. Kurangnya koordinasi antar unit kerja 3. Fragmentasi program dan kegiatan 4. Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi	Penerapan prinsip tata kelola berkelanjutan dalam manajemen pendidikan	Standar governansi pendidikan internasional	Implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	Perbedaan capaian kinerja tata kelola pendidikan antar kabupaten/kota	Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi
Pengembangan pendidikan karakter dan kearifan lokal	1. Rendahnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum 2. Masalah kekerasan, bullying, dan intoleransi di sekolah	Pelestarian dan pemanfaatan nilai kearifan lokal untuk pembangunan berkelanjutan	Tren global pendidikan karakter dan identitas budaya	Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)	Keragaman budaya dan kearifan lokal antar pulau di Kepulauan Riau	Penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal maritim

	3. Ancaman terhadap pelestarian bahasa dan budaya lokal 4. Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai budaya maritim					
Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam pendidikan	1. Kerentanan fasilitas pendidikan terhadap bencana alam 2. Rendahnya kesadaran tentang mitigasi perubahan iklim 3. Minimnya pendidikan lingkungan hidup di sekolah 4. Ancaman banjir rob terhadap sekolah di pesisir	Adaptasi pendidikan terhadap perubahan iklim dan peningkatan ketahanan sekolah	Agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan kesepakatan global tentang perubahan iklim	Program Adiwiyata dan pendidikan lingkungan hidup	Kerentanan wilayah kepulauan terhadap dampak perubahan iklim	Penguatan ketahanan pendidikan terhadap perubahan iklim

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dirumuskan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. Tujuan utama adalah meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan serta memperkuat pembangunan karakter pemuda dan pengembangan olahraga yang inklusif dan berdaya saing. Sasaran-sasaran ini mencakup peningkatan angka partisipasi sekolah di semua jenjang pendidikan, pemerataan distribusi guru yang berkualitas, pengembangan fasilitas pendidikan dan olahraga yang memadai, serta pemberdayaan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Pencapaian tujuan tersebut dirancang melalui pendekatan strategis yang mempertimbangkan tantangan dan peluang, seperti karakteristik wilayah kepulauan, dinamika globalisasi, dan perubahan iklim. Sasaran yang ditetapkan mencakup pelaksanaan program inovatif seperti digitalisasi pendidikan, pelatihan keterampilan berbasis teknologi bagi pemuda, serta pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi masyarakat. Dengan sasaran yang terukur, diharapkan Renstra ini mampu menjadi landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Anambas, menciptakan masyarakat yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif di tingkat lokal maupun global.

Berikut ini adalah tabel yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, beserta indikator kinerja dan target yang telah disusun untuk lima tahun mendatang, yakni dari 2025 hingga 2029.

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Permendagri 18 Tahun 2020	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan		Rata - Rata lama Sekolah	7.62	8.01	8.4	8.8	9.19	9.59	
			Harapan Lama Sekolah	13.2	13.3	13.39	13.49	13.59	13.68	
		Meningkatnya Intelektualitas Anak Usia Sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	65.1	67.6	70.1	72.6	75.1	77.6	
			Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	71.35	72.45	73.55	74.65	75.75	76.85	
			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	54.97	57.87	60.77	63.67	66.57	69.47	
			Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	62.27	63.77	65.27	66.77	68.27	69.77	
	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda	69.5	69.52	69.58	69.6	69.63	69.65	
		Meningkatnya Keterlibatan Pemuda Dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Rasio Wirausaha Pemuda	65%	67%	70%	73%	75%	77%	
		Meningkatnya Pembinaan dan Capaian Prestasi Pemuda di Bidang Olahraga	Persentase Atlet yang masuk dalam kejuaraan tingkat provinsi	40	45	50	56	70	75	
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	77	78	78	80	81	82	
	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Predikat	B	B	B	B	BB	BB	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) angka	63,66	65,34	67,05	68,72	70,46	71,86	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mendukung Program Prioritas Nasional

Untuk menerjemahkan Visi "Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera", Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mengadopsi strategi konvergensi. Strategi ini secara proaktif memanfaatkan program-program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bukan sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen pengungkit untuk mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah yang telah ditetapkan. Setiap arah kebijakan dirumuskan secara adaptif untuk menjawab tantangan unik geografis dan sosial-ekonomi Kepulauan Anambas. Implementasinya akan berlandaskan tiga pilar strategis utama yang saling terkait.

Pilar Strategis 1: Akselerasi Peningkatan Mutu dan Ekuitas Pendidikan

Pilar ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kualitas dan akses yang menjadi akar permasalahan di wilayah kepulauan. Fokusnya adalah memastikan bahwa setiap investasi dalam pendidikan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

- Strategi: Mensinergikan program Revitalisasi Sekolah, Digitalisasi Pembelajaran, dan Wajib Belajar 13 Tahun untuk menciptakan ekosistem belajar yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menolak perbaikan yang bersifat parsial, dan sebaliknya, mendorong intervensi yang terintegrasi antara infrastruktur fisik, kapabilitas digital, dan jaring pengaman sosial.
- Arah Kebijakan:
 1. Revitalisasi Infrastruktur Berbasis Data Kebutuhan (Need-Based): Kebijakan revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada peningkatan fungsi ruang

belajar. Pelaksanaannya akan dipandu oleh pemetaan kondisi sekolah, memprioritaskan satuan pendidikan di pulau-pulau terpencil yang memiliki Indeks Kerusakan Bangunan tertinggi. Langkah ini krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, yang menjadi prasyarat untuk mencapai target peningkatan Skor Literasi/Numerasi hingga 99,5 pada tahun 2029, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

2. Digitalisasi Adaptif dan Inklusif: Menyadari tantangan *digital divide*, kebijakan digitalisasi akan menerapkan pendekatan ganda. Di wilayah dengan konektivitas memadai, akan didorong pemanfaatan platform pembelajaran daring dan pengembangan konten digital interaktif. Di wilayah *blank spot*, fokus akan diberikan pada penyediaan sumber belajar digital berbasis luring (*offline*) dan pelatihan guru untuk memaksimalkan teknologi sederhana. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa teknologi menjadi alat pemerataan, bukan alat yang memperlebar kesenjangan, serta secara langsung mendukung agenda peningkatan kualitas kurikulum pendidikan.
3. Intervensi Berlapis untuk Penuntasan Wajib Belajar: Untuk mencapai target Harapan Lama Sekolah (HLS) 95 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 85 tahun pada 2029, kebijakan penanganan Angka Putus Sekolah (APS) akan bersifat preventif dan kuratif. Tindakan preventif mencakup sistem deteksi dini bagi siswa yang berisiko putus sekolah melalui kolaborasi dengan wali kelas dan komite sekolah. Tindakan kuratif meliputi penyediaan layanan pendidikan kesetaraan yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja lokal, sehingga memberikan insentif bagi mereka untuk kembali belajar.

Pilar Strategis 2: Reformasi Tata Kelola Pendidikan yang Adaptif dan Akuntabel

Pilar ini berfokus pada penguatan sistem manajemen dan pengawasan untuk memastikan setiap sumber daya yang dialokasikan memberikan nilai manfaat maksimal dan meningkatkan kepercayaan publik.

- Strategi: Menggunakan momentum program Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai pintu masuk untuk membangun ekosistem tata kelola berbasis dari tingkat dinas hingga ke satuan pendidikan.
- Arah Kebijakan:
 1. Penguatan Objektivitas dan Transparansi SPMB: Untuk menjamin pemerataan akses, akan dibentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor (Disdikpora, Dinsos, Diskominfo) yang dilegalkan melalui Surat Keputusan Bupati. Tim ini bertugas melakukan sinkronisasi data kependudukan dengan proyeksi jumlah siswa dan daya tampung sekolah. Digitalisasi pendaftaran melalui aplikasi Ketipas akan menjadi standar utama, didukung oleh kebijakan toleransi nol terhadap pungutan liar dan gratifikasi. Langkah-langkah ini secara langsung bertujuan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat hingga mencapai nilai A (90,5) pada tahun 2029.
 2. Membudayakan Siklus Peningkatan Mutu Berkelanjutan: Kebijakan ini akan mengubah paradigma penjaminan mutu dari sekadar pemenuhan administratif menjadi sebuah siklus perbaikan yang hidup. Satuan pendidikan akan diwajibkan untuk menggunakan Rapor Pendidikan sebagai dasar utama penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Disdikpora akan memberikan pendampingan teknis agar sekolah mampu menerjemahkan data rapor menjadi program-program intervensi yang efektif. Budaya ini akan menjadi tulang punggung dalam upaya pencapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan (AKIP) dengan predikat BB (76,5) pada tahun 2029.

Pilar Strategis 3: Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul secara Holistik

Pilar ini menekankan bahwa pembangunan SDM tidak cukup hanya melalui transfer ilmu pengetahuan, tetapi harus mencakup pembentukan karakter yang kuat dan pemenuhan kesejahteraan dasar siswa.

- Strategi: Mengintegrasikan program Penguatan Pendidikan Karakter dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai satu kesatuan pendekatan yang berinvestasi pada "keseluruhan diri anak" (*the whole child*), mencakup aspek kognitif, afektif, dan fisik.
- Arah Kebijakan:
 1. Penciptaan Ekosistem Pendidikan Karakter "Tri Sentra": Mengadopsi filosofi Ki Hajar Dewantara, penguatan karakter akan melibatkan tiga pusat pendidikan secara sinergis.
 - Lingkungan Sekolah akan menerapkan pembiasaan nilai-nilai luhur dan program anti-perundungan.
 - Lingkungan Keluarga akan dilibatkan secara aktif melalui program *class parenting* regular.
 - Lingkungan Masyarakat akan didukung melalui kebijakan seperti jam malam belajar siswa yang diatur melalui Surat Edaran Bupati.
 2. Implementasi Program MBG yang Kontekstual dan Berkelanjutan: Menyadari kompleksitas logistik di wilayah kepulauan, implementasi MBG akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal adalah proyek percontohan (*piloting*) di beberapa sekolah yang mewakili karakteristik geografis berbeda (perkotaan, pesisir, dan pulau terluar). Hasil dari proyek

percontohan ini akan digunakan untuk merancang model distribusi dan pengelolaan yang paling efisien. Arah kebijakan ini juga menekankan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan memprioritaskan pelibatan UMKM dan pemasok bahan pangan dari masyarakat setempat, sehingga program ini tidak hanya meningkatkan gizi siswa tetapi juga menggerakkan ekonomi desa.

3.3. Strategi Dan Kebijakan Dalam Mendukung Program Unggulan Pemerintah Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. Strategi utama yang diambil adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, baik manusia, finansial, maupun aset daerah, dengan memperhatikan potensi dan tantangan lokal terkhusus yang terkait dengan program unggulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di dalam misinya.

Untuk mewujudkan strategi tersebut, kebijakan operasional diarahkan pada beberapa langkah konkret, seperti digitalisasi administrasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan, serta pemberdayaan komunitas lokal dalam pelestarian kearifan budaya. Dengan pendekatan strategis yang holistik dan berbasis data, diharapkan kebijakan ini mampu mendorong terwujudnya pendidikan berkualitas, pemuda yang berdaya saing, dan masyarakat yang sehat serta aktif berolahraga.

Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:

Tabel 3. 2
Strategi dan Kebijakan

Visi		: Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera			
Misi		: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;			
No.	Program Unggulan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Program Zero Buta Huruf	Mengentaskan buta huruf di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Meningkatkan tingkat literasi fungsional masyarakat pesisir. Membangun budaya belajar sepanjang hayat.	Angka buta huruf 0% di semua kecamatan. Akses pendidikan keaksaraan tersedia di setiap desa/kelurahan. Partisipasi pendidikan orang dewasa di daerah terpencil $\geq 95\%$.	Pemetaan Kantong Buta Huruf dan Pengembangan Sistem Informasi Digital	Membentuk forum koordinasi antara OPD, tokoh agama, dan komunitas lokal untuk validasi data. Menetapkan regulasi wajib belajar minimal 9 tahun dengan fokus pada kelompok rentan (anak putus sekolah (usia sekolah dan ibu rumah tangga, nelayan). Mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk survei dan pemantauan real-time.
				Pengembangan Modul Kontekstual Berbasis Kehidupan Maritim	Mengintegrasikan nilai-nilai luhur maritim (misalnya, literasi ekonomi nelayan, pengelolaan sumber daya laut) dalam kurikulum keaksaraan. Menyediakan modul cetak dan digital yang dapat diakses tanpa internet (offline). Melibatkan guru agama dan tokoh adat dalam penyusunan materi agar relevan dengan budaya lokal.

				Monitoring dan Evaluasi Berbasis Teknologi	Memberikan insentif bagi tutor lokal yang berkontribusi dalam program keaksaraan. Mengalokasikan dana CSR dari sektor maritim (perikanan, pariwisata) untuk membangun dan memelihara PKBM. Menetapkan masjid/mushola sebagai pusat pembelajaran keagamaan dan keaksaraan melalui SK Bupati.
2	Program Bantuan Perlengkapan Sekolah SD-SMP	Memastikan akses merata perlengkapan pendidikan bagi siswa prasejahtera. Mengurangi disparitas kualitas pendidikan antar-pulau. Menurunkan angka putus sekolah hingga $\leq 1\%$.	100% siswa prasejahtera mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah. Kehadiran siswa di sekolah terpencil $\geq 95\%$.	Pendataan Akurat Melalui Dapodik dan Pemetaan Disparitas	Mengintegrasikan data Dapodik dengan Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos untuk memvalidasi penerima manfaat. Menetapkan kriteria penerima bantuan berbasis geospasial (pulau terpencil, zona rawan kemiskinan). Membentuk tim monitoring dari komite sekolah dan LSM untuk transparansi distribusi.
				Distribusi Logistik Berbasis Kapal Laut/Truk Laut	Menjalin kerja sama dengan BUMN (Pelni, ASDP) untuk distribusi logistik ke pulau terpencil. Menggunakan pelabuhan perintis sebagai titik distribusi bantuan. Menetapkan QR Code pada perlengkapan sekolah untuk memastikan akuntabilitas.

				Diversifikasi Bantuan (Seragam, Buku, Kit Praktikum)	Menyediakan paket lengkap perlengkapan sekolah (seragam, buku, alat tulis, sepatu, tas). Menambahkan kit praktikum sederhana untuk mata pelajaran sains dan vokasi. Mengintegrasikan dengan program gizi sekolah (makanan tambahan) untuk meningkatkan kesiapan belajar
--	--	--	--	--	--

Tabel ini menjelaskan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya mendukung program unggulan Kepala Daerah terpilih. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program ini kedepannya akan dapat dijalankan dan menghasilkan dampak positif sesuai visi daerah menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan kebutuhan pendanaan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan, pemuda, dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas. Program-program strategis yang dirancang mencakup peningkatan akses dan mutu pendidikan, pengembangan potensi pemuda, serta penguatan sarana dan prasarana olahraga. Beberapa kegiatan utama dalam program ini meliputi rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pendidikan dan olahraga, pelatihan peningkatan kompetensi guru, penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi, pelatihan keterampilan bagi pemuda, serta pembinaan atlet dan promosi olahraga di masyarakat. Setiap kegiatan dirancang untuk mendukung tercapainya indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Pendanaan program dan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kemungkinan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Proses perencanaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan transparan, mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan menjadi bagian integral dari proses ini, guna memastikan kesesuaian alokasi dana dengan capaian kinerja yang direncanakan. Dengan perencanaan yang terukur dan pendanaan yang memadai, diharapkan setiap program dan kegiatan mampu memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan daerah, khususnya di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. Fokus utamanya adalah penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas administrasi, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini dirancang untuk memastikan pengelolaan sistem pendidikan berjalan optimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kegiatannya meliputi penguatan manajemen sekolah, penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, dan pemantauan capaian kinerja pendidikan di seluruh jenjang.

3. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Upaya ini mencakup integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, pelestarian kearifan lokal dalam kurikulum, serta penyusunan bahan ajar yang inovatif dan adaptif.

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Kegiatan lainnya mencakup pemerataan distribusi guru ke daerah terpencil dan pemberian insentif bagi guru berprestasi.

5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan. Kegiatan meliputi evaluasi perizinan

lembaga pendidikan, pendampingan kepada lembaga baru, dan pengawasan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini dirancang untuk memberdayakan pemuda melalui pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, dan penguatan karakter kepemimpinan. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah serta pengembangan literasi digital dan inovasi teknologi.

7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga serta mendorong pembinaan atlet berbakat. Kegiatan meliputi penyediaan fasilitas olahraga, pelatihan pelatih dan atlet, serta penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat daerah dan nasional.

8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini bertujuan untuk memperkuat peran gerakan Pramuka dalam membangun karakter generasi muda. Kegiatan mencakup pelatihan keterampilan kepramukaan, pembinaan gugus depan, dan pengembangan program-program inovatif yang relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini.

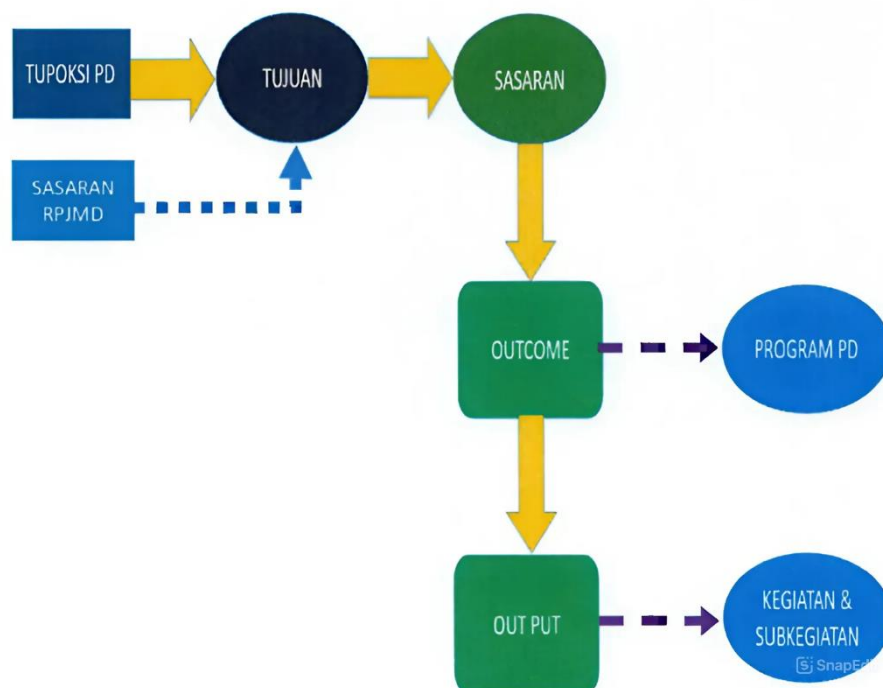
Dalam bab dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ini memuat sejumlah tabel yang disusun untuk menjabarkan kerangka perencanaan strategis secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Tabel-tabel ini dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang menekankan pada:

1. Keterkaitan hierarkis antara program, kegiatan, dan subkegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Akuntabilitas kinerja melalui indikator yang terukur.
3. Transparansi alokasi anggaran berbasis kinerja.
4. Penajaman prioritas untuk menjawab kebutuhan strategis daerah.

Tabel-tabel dalam bab ini berfungsi sebagai alat untuk:

1. Memetakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan visi-misi daerah.
2. Menjamin keselarasan antara kebijakan nasional, RPJMD, dan kebutuhan lokal di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan.
3. Mengalokasikan sumber daya (anggaran, SDM, sarana) secara efisien berdasarkan skala prioritas.
4. Memantau capaian kinerja melalui indikator yang relevan, serta mengevaluasi dampak program terhadap peningkatan kualitas layanan publik.

**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan
Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**



Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur disajikan secara lengkap pada tabel-tabel berikut.

4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel berikut ini disusun untuk merinci struktur program strategis yang menjadi fokus Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Setiap program dikaitkan dengan dasar hukum (NSPK), sasaran RPJMD, tujuan, output, dan indikator kinerja. Tujuannya adalah memastikan semua kegiatan operasional memiliki landasan regulasi yang jelas dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Tabel 4. 1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4	5	6	7		8
Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Permendagri 18 Tahun 2020	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik				Indeks reformasi birokrasi			
		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah			1. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) 2. Indeks kepuasan masyarakat			
			Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan di dinas sesuai dengan prosedur		Persentase penunjang administrasi pelayanan di dinas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun	Persentase terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
							Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
							Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Tersedianya Operasional Kantor		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
							Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Mewujudkan Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata.				Indeks pendidikan			

		Meningkatnya kualitas dan tingkat Partisipasi pendidikan			1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi 2. Tingkat partisipasi warga negara 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD dan SMP) 3. Tingkat partisipasi warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 4. Persentase tenaga pendidik yang melaksanakan peningkatan kompetensinya 5. Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dan penyediaan sarana pendidikan				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

			Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan		Tingkat pengelolaan pendidikan yang terpenuhi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
				Terlaksananya pemenuhan mutu pelayanan pendidikan di sekolah dasar	Persentasi Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
							Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
							Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
							Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
							Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
							Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
							Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	

							Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
							Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
							Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
							Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
							Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
							Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
							Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
							Pembangunan Ruang Kelas Baru	
							Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	

					Persentase Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
							Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
							Pembangunan Laboratorium	
							Pembangunan Kantin Sekolah	
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
							Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
							Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
							Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	

							Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
							Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
							Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
							Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
							Pembangunan Ruang Kelas Baru	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Persentase Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
							Pengadaan Mebel PAUD	
							Pengadaan Perlengkapan PAUD	
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	

							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
							Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
							Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
							Pengelolaan Dana BOP PAUD	
							Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
							Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
							Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Terlaksananya pemenuhan mutu pelayanan pendidikan di Non formal/Kesetaraan	Persentase Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	

							Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan		Persentase yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Terlaksananya penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan	Jumlah kurikulum muatan lokal yang disusun		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
							Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
							Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
							Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
		Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diberikan peningkatan kompetensi, pengembangan karir, dan kesejahteraan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

				Terlaksananya penataan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
							Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengendalian perizinan pendidikan		Persentase satuan pendidikan / lembaga yang memiliki izin operasional dan perpanjangan izin operasional	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		
				Terlaksananya penerbitan izin	jumlah lembaga yang memiliki izin operasional		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
							Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
							Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

		Meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan kepemudaan, dan pramuka serta pengembangan prestasi di bidang olahraga			1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif 2. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi 3. Persentase sarana dan prasarana olahraga yang di bangun/direhabilitasi 4. Tingkat partisipasi Kepramukaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
			Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan		persentase pengembangan terkait daya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
				Persentase tercapainya jumlah pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader di kabupaten kepulauan anambas	persentase pelaksanaan pengembangan daya saing kepemudaan		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
							Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	

							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
							Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			Terbinanya organisasi tingkat kabupaten/ kota	persentase organisasi pemuda yang dikembangkan		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
							Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
		Meningkatnya pengembangan keolahragaan		Persentase pengembangan keolahragaan di daerah		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
			Terselenggaranya pembinaan olahraga jenjang pendidikan kabupaten/kota	jumlah sekolah Dasar yang difasilitasi sarpras olahraga jumlah sekolah menengah pertama yang difasilitasi sarpras olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
							Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	

				Terselenggaranya kejuaraan/kompetisi olahraga tingkat kabupaten/kota	jumlah sekolah Dasar yang difasilitasi sarpras olahraga jumlah sekolah menengah pertama yang difasilitasi sarpras olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
							Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
							Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Telaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	persentase jumlah atlet yang diseleksi dan dibina	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
							Seleksi Atlet Daerah	
							Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
				Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
							Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
							Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	

				Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	persentase pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang di laksanakan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
							Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
			Meningkatnya jumlah peserta pramuka yang telah dibina tingkat kabupaten/kota		Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
				Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
							Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
							Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	
							Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tabel ini menguraikan alokasi pendanaan indikatif yang disusun berdasarkan prinsip performance-based budgeting, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Setiap program dan subkegiatan dilengkapi dengan baseline data tahun 2024 serta target kinerja tahunan yang realistis. Contohnya, program peningkatan sarana pendidikan dasar mencantumkan target persentase ketersediaan infrastruktur yang meningkat secara bertahap, disertai pagu anggaran yang proporsional dengan skala prioritas.

Selain itu, tabel ini memastikan transparansi dan efisiensi melalui integrasi antara perencanaan anggaran dengan capaian kinerja. Alokasi dana untuk kegiatan tertentu, seperti rehabilitasi sarana olahraga atau pelatihan kompetensi guru, dikaitkan langsung dengan indikator output seperti jumlah fasilitas yang direvitalisasi atau peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Pendekatan ini meminimalisasi risiko pemborosan anggaran dan memastikan penggunaan sumber daya sesuai dengan prinsip value for money.

Tabel 4. 2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					215,140,607,232		219,555,373,865		223,970,140,493		227,532,631,565		231,947,398,199	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (7)*100%	100%	100%	169,672,602,915	100%	171,360,428,944	100%	173,082,922,233	100%	174,813,752,456	100%	176,561,990,981	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Akumulasi nilai persepsi masyarakat terhadap beberapa unsur pelayanan publik yang dinilai	87%	87,5%		88%		88,5%		89%		89,5%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan dibagi dokumen laporan kinerja dan hasil pengendalian evaluasi yang disusun*100% kinerja yang seharusnya tepat waktu*100 %	8	60%	21,000,000	61%	30,532,308	62%	40,159,938	63%	49,883,846	64%	59,804,992	65%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	6	1,000,000	6	10,532,308	6	20,159,938	6	29,883,846	6	39,804,992	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		0	8	10,000,000	8	10,000,000	8	10,000,000	8	10,000,000	8	10,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang diberikan tepat waktu dalam 1 tahun / jumlah layanan yang seharusnya ada*100%	100%	61%	168,999,472,145	61%	170,677,765,866	62%	172,390,631,525	63%	174,111,737,840	64%	175,850,055,219	65%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		860	1646	168,699,472,145	1500	170,377,765,866	1646	172,090,631,525	1646	173,811,737,840	1646	175,550,055,219	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan dalam mendukung manajemen ASN di lingkungan perangkat daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu/ jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang seharusnya*100%	100%	61%	56,930,770	61%	56,930,770	62%	56,930,770	63%	56,930,770	64%	56,930,770	65%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		5	4	56,830,770	4	56,830,770	4	56,830,770	4	56,830,770	4	56,830,770	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20	40	100,000	40	100,000	40	100,000	40	100,000	40	100,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang mencakup penyediaan bahan perkantoran, dan pelayanan tamu,	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu,	Jumlah kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan makanan-minuman, perjalanan dinas, dan pembayaran	100%	61%	300,000,000	61%	300,000,000	62%	300,000,000	63%	300,000,000	64%	300,000,000	65%

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pelaksanaan rapat, aktivitas lapangan, pelayanan tamu, perjalanan dinas, dan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	perjalanan dinas serta dukungan SPBE	honor SPBE/ jumlah keseluruhan (8)*100%												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	7	80,000,000	7	80,000,000	7	80,000,000	7	80,000,000	7	80,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan/jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah*100%	71%	61%	100,000	61%	100,000	62%	100,000	63%	100,000	64%	100,000	65%
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		3	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya layanan jasa administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan jasa administrasi	Jumlah kebutuhan jasa administrasi	100%	62%	180,000,000	62%	180,000,000	63%	180,000,000	64%	180,000,000	65%	180,000,000	66%

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dan langganan operasional yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	perkantoran dan langganan lainnya	perkantoran yang terpenuhi/ seluruh kebutuhan jasa*100%												
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah agar tetap berfungsi dan dalam kondisi baik untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik (kendaraan dinas, mebel dan peralatan mesin/2*100%)	100%	61%	115,100,000	61%	115,100,000	62%	115,100,000	63%	115,100,000	64%	115,100,000	65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		3	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia (5-6) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)		85.83	100	44,868,003,317	100	47,494,943,921	100	50,187,217,260	100	51,858,878,109	100	54,535,406,218	
	Persentase anak usia (7-15) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		98,95	100		100		100		100				
	Persentase anak usia (7-18) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)		18.47	26.67		30.77		34.87		38.97		43.07		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
Terlaksananya pengelolaan pendidikan dasar (sarpras, pelayanan untuk siswa, pemenuhan guru, pelayanan sekolah)	Tingkat pengelolaan pendidikan dasar (sarpras, pelayanan untuk siswa, pemenuhan guru, pelayanan sekolah)	(Jumlah Skor Komponen Pengelolaan / Skor Maksimal Seluruh Komponen) X 100%	10%	76%	19,126,430,433	76%	20,544,471,037	77%	23,245,544,381	78%	24,716,730,433	79%	25,243,933,334	80%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		3	1	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		2	1	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		3	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		1	1	250,000,000	3	418,040,604	4	500,000,000	4	500,000,000	4	467,402,901	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		2	1	184,723,433	1	184,723,433	1	184,723,433	1	184,723,433	1	184,723,433	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1	2	200,000,000	5	600,000,000	5	519,113,948	7	800,000,000	9	1,000,000,000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		5	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		1	50	2,400,000,000	55	3,000,000,000	58	3,500,000,000	63	3,500,000,000	68	3,500,000,000	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		30	80	350,000,000	17	350,000,000	17	400,000,000	18	450,000,000	20	500,000,000	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		30	30	349,900,000	10	499,900,000	10	499,900,000	11	450,000,000	11	500,000,000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		17	150	800,000,000	150	800,000,000	150	800,000,000	150	900,000,000	100	900,000,000	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		68	68	450,000,000	68	450,000,000	68	450,000,000	68	450,000,000	68	500,000,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		68	68	7,591,807,000	68	7,591,807,000	68	7,591,807,000	68	7,591,807,000	68	7,591,807,000	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,		0	75	350,000,000	30	400,000,000	30	450,000,000	30	450,000,000	30	500,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		2	5	350,000,000	6	400,000,000	7	450,000,000	7	450,000,000	7	450,000,000	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		20	75	350,000,000	75	350,000,000	75	400,000,000	75	500,000,000	75	500,000,000	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	5	350,000,000	5	350,000,000	6	400,000,000	7	450,000,000	8	500,000,000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1	10	350,000,000	10	350,000,000	10	400,000,000	10	450,000,000	10	500,000,000	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		20	34	350,000,000	34	350,000,000	37	400,000,000	45	500,000,000	50	500,000,000	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1	10	400,000,000	10	400,000,000	10	400,000,000	10	500,000,000	10	400,000,000	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		5	7	1,350,000,000	7	1,350,000,000	7	2,000,000,000	7	2,690,200,000	7	3,000,000,000	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		25	50	450,000,000	50	450,000,000	50	450,000,000	50	450,000,000	50	350,000,000	
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat		9	2	250,000,000	2	250,000,000	5	700,000,000	5	700,000,000	6	800,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		404	200	800,000,000	200	800,000,000	200	800,000,000	200	800,000,000	200	500,000,000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		11	3	300,000,000	3	300,000,000	3	450,000,000	3	450,000,000	5	600,000,000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
Terlaksananya pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (sarpras, pelayanan untuk siswa, pemenuhan guru, pelayanan sekolah)	Tingkat pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (sarpras, pelayanan guru, pelayanan sekolah) tingkat pengelolaan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	(Jumlah Skor Komponen Pengelolaan / Skor Maksimal Seluruh Komponen) X 100%	13%	76%	17,998,192,884	76%	18,807,192,884	77%	18,998,042,879	78%	18,798,767,676	79%	20,948,092,884	80%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		3	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		3	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	
Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		6	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		5	2	350,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	3	500,774,792	5	800,000,000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		5	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	3	500,000,000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		8	10	2,998,712,884	10	2,998,712,884	10	2,998,712,884	10	2,998,712,884	10	2,998,712,884	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		27	27	2,450,000,000	27	2,459,000,000	27	2,450,000,000	27	2,450,000,000	27	2,450,000,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima		985	715	1,300,000,000	715	1,300,000,000	715	1,300,000,000	715	1,300,000,000	715	1,300,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Biaya Personil Peserta Didik													
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik		20	20	200,000,000	23	350,000,000	23	350,000,000	23	350,000,000	30	500,000,000	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		10	10	200,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	20	500,000,000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		30	90	800,000,000	90	800,000,000	90	800,000,000	90	800,000,000	90	900,000,000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		27	27	4,599,480,000	27	4,599,480,000	27	4,599,480,000	27	4,599,480,000	27	4,599,480,000	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		20	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		2	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	500,000,000	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		20	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	350,000,000	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	1	200,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	449,900,000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	2	450,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		20	27	350,000,000	27	350,000,000	27	350,000,000	27	350,000,000	27	450,000,000	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		27	27	200,000,000	27	350,000,000	27	350,000,000	27	249,800,000	27	450,000,000	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		3	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		27	7	1,850,000,000	7	1,850,000,000	7	2,049,849,995	7	1,850,000,000	7	1,850,000,000	
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat		20	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		250	2	250,000,000	2	450,000,000	2	450,000,000	2	450,000,000	2	700,000,000	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)														
Terlaksananya pengelolaan PAUD (sarpras, pelayanan untuk siswa, pemenuhan guru, pelayanan sekolah)	Tingkat pengelolaan PAUD (sarpras, pelayanan untuk siswa, pemenuhan guru, pelayanan sekolah)	(Jumlah Skor Komponen Pengelolaan / Skor Maksimal Seluruh Komponen) X 100%	17%	74%	7,228,900,000	74%	7,628,800,000	75%	7,429,150,000	76%	7,828,900,000	76%	7,828,900,000	77%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		8	4	900,000,000	4	900,000,000	4	900,000,000	4	900,000,000	4	900,000,000	
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		5	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		2	4	1,500,000,000	4	1,500,000,000	4	1,500,000,000	4	1,500,000,000	4	1,500,000,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1894	2030	1,958,800,000	2030	1,958,800,000	2030	1,958,800,000	2030	1,958,800,000	2030	1,958,800,000	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		10	10	200,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan		20	20	200,000,000	20	350,000,000	20	350,000,000	20	350,000,000	20	350,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi													
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		68	70	200,000,000	70	200,000,000	70	250,000	70	200,000,000	70	200,000,000	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		68	70	120,000,000	70	120,000,000	70	120,000,000	70	120,000,000	70	120,000,000	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	1	150,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1894	5	800,000,000	5	800,000,000	5	800,000,000	5	800,000,000	5	800,000,000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		10	4	100,000	4	-	4	100,000	4	100,000	4	100,000	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		68	70	500,000,000	70	500,000,000	70	500,000,000	70	500,000,000	70	500,000,000	
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		10	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (sarpras, pelayanan untuk siswa, pemenuhan guru, pelayanan sekolah)	Tingkat pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (sarpras, pelayanan untuk siswa, pemenuhan guru, pelayanan sekolah)	(Jumlah Skor Komponen Pengelolaan / Skor Maksimal Seluruh Komponen) X 100%	27%	71%	514,480,000	71%	514,480,000	72%	514,480,000	73%	514,480,000	74%	514,480,000	75%

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		120	100	314,480,000	100	314,480,000	100	314,480,000	100	314,480,000	100	314,480,000	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		4	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia		1	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM														
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	(Jumlah Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal / Jumlah Seluruh Satuan Pendidikan) X 100%	100%	100%	350,001,000	100%	350,001,000	100%	350,001,000	100%	350,001,000	100%	350,001,000	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
Tersusunnya kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar	Tingkat penerapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar	(Jumlah satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal / Jumlah Seluruh Satuan Pendidikan Dasar) X 100%	20%	72%	350,001,000	72%	350,001,000	73%	350,001,000	74%	350,001,000	75%	350,001,000	76%
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		95	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia		231	231	250,000,000	231	250,000,000	231	250,000,000	231	250,000,000	231	250,000,000	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		95	95	1,000	95	1,000	95	1,000	95	1,000	95	1,000	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	(Jumlah Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik / Jumlah Seluruh Guru) X 100%	59%	76%	150,000,000	76%	200,000,000	77%	200,000,000	78%	350,000,000	79%	350,000,000	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
Meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	(Jumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan / Jumlah Satuan Pendidikan yang ditargetkan menerima pemerataan) X 100%	14%	76%	150,000,000	76%	200,000,000	77%	200,000,000	78%	350,000,000	79%	350,000,000	80%
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1	3	150,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN														
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	(Jumlah usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan / Jumlah total usulan izin satuan pendidikan yang masuk) X 100%	82%	61%	100,000,000	62%	150,000,000	63%	150,000,000	64%	160,000,000	65%	150,000,000	
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
Meratanya distribusi institusi pendidikan	Persentase lembaga yang memiliki izin operasional	(Jumlah lembaga yang memiliki izin operasional / Jumlah lembaga yang wajib	20%	61%	100,000,000	61%	150,000,000	63%	150,000,000	64%	160,000,000	65%	150,000,000	65%

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		memiliki izin operasional) X 100%												
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		6	10	50,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000	14	80,000,000	14	80,000,000	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		0	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	80,000,000	20	70,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5,597,724,433		5,597,724,433		5,597,724,438		6,450,000,000		6,450,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5,597,724,433		5,597,724,433		5,597,724,438		6,450,000,000		6,450,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pembinaan Kapasitas Kepemudaan	(Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan / Jumlah total pemuda yang menjadi target pembinaan) X 100%	65.50%	66%	1,150,000,000	67%	1,150,000,000	68%	1,150,000,000	69%	1,150,000,000	70%	1,150,000,000	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota														
Terlaksananya pengembangan daya saing kepemudaan	Persentase pelaksanaan pengembangan daya saing kepemudaan	(Jumlah kegiatan pengembangan daya saing kepemudaan yang terlaksana / Jumlah total kegiatan yang direncanakan) X 100%	76.54%	66%	950,000,000	66%	950,000,000	67%	950,000,000	68%	950,000,000	69%	950,000,000	70%

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota		5	7	250,000,000	7	250,000,000	7	250,000,000	7	250,000,000	7	250,000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		20	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		60	60	300,000,000	60	300,000,000	60	300,000,000	60	300,000,000	60	300,000,000	
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		5	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya pengembangan organisasi pemuda	Persentase organisasi pemuda yang dikembangkan	(Jumlah organisasi pe muda yang dikembang kan / Jumlah organisasi pemuda yang menjadi target pengembangan) X 100%	21%	61%	200,000,000	61%	200,000,000	62%	200,000,000	63%	200,000,000	64%	200,000,000	65%
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang berprestasi tingkat provinsi	(Jumlah atlet yang me raih prestasi tingkat pr ovinsi / Jumlah total atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi) X 100%	49%	71%	4,247,724,433	72%	4,247,724,433	73%	4,247,724,438	74%	5,000,000,000	75%	5,000,000,000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
Tersedianya Fasilitas olahraga pendidikan yang ditingkatkan atau disediakan di sekolah	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang tersedia atau ditingkatkan (lapangan, alat olahraga, dll)	(Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia atau ditingkatkan / Jumlah total sarana prasarana yang menjadi target peningkatan) X 100%	25%	71%	500,000,000	71%	500,000,000	70%	500,000,000	72%	500,000,000	73%	500,000,000	74%
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sekolah yang difasilitasi alat olahraga		1	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota	Persentase kejuaraan olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan per tahun	(Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan / Jumlah total target penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah) X 100%	23%	66%	1,050,000,000	66%	1,050,000,000	67%	1,050,000,000	68%	1,150,000,000	69%	1,150,000,000	70%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		5	7	500,000,000	7	500,000,000	7	500,000,000	7	500,000,000	7	500,000,000	70%
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan		100	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	650,000,000	100	650,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pekan dan kejuaraan olahraga	Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota													
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya jumlah atlet yang dibina secara berkelanjutan	Persentase atlet yang mengikuti program pembinaan olahraga prestasi	(Jumlah atlet yang mengikuti program pembinaan olahraga prestasi / Jumlah total target atlet yang harus memperoleh pembinaan) X 100%	20%	71%	600,000,000	71%	600,000,000	72%	600,000,000	73%	750,000,000	74%	750,000,000	75%
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		80	80	200,000,000	80	200,000,000	80	200,000,000	80	350,000,000	80	350,000,000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		80	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga														
Terbinanya organisasi olahraga di tingkat daerah	Persentase organisasi olahraga yang mendapatkan pembinaan (pelatihan, fasilitasi, konsultasi teknis)	(Jumlah organisasi olahraga yang mendapatkan pembinaan / Jumlah total target organisasi olahraga yang direncanakan mendapatkan pembinaan) X 100%	21%	71%	550,000,000	80	550,000,000	80	550,000,000	80	800,000,000	80	800,000,000	
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		5	3	550,000,000	3	550,000,000	3	550,000,000	3	800,000,000	3	800,000,000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi														
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga rekreasi	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan olahraga rekreasi (jalan sehat, senam massal, fun run, dll.)	(Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan olahraga rekreasi / Jumlah total target peserta yang direncanakan mengikuti kegiatan	18%	66%	1,547,724,433	66%	1,547,724,433	65%	1,547,724,438	67%	1,800,000,000	68%	1,800,000,000	69%

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		olahraga rekreasi) X 100%												
Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		3	5	1,547,724,433	5	1,547,724,433	5	1,547,724,438	5	1,800,000,000	5	1,800,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN														
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	(Jumlah masyarakat (pemuda/pelajar) yang aktif dalam kegiatan kepramukaan / Jumlah masyarakat (pemuda/pelajar) yang menjadi target partisipasi) X 100%	77%	78%	200,000,000	78%	200,000,000	80%	200,000,000	81%	300,000,000	82%	300,000,000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan														
Terbinanya Gugus Depan (Gudep) dan Kwartir Ranting/Kecamatan secara aktif	Persentase Gudep dan Kwartir Ranting yang aktif melakukan kegiatan pembinaan dan pelaporan rutin	(Jumlah Gudep dan Kwartir Ranting yang aktif melakukan kegiatan pembinaan dan pelaporan rutin / Jumlah total Gudep dan Kwartir Ranting yang menjadi target sasaran kegiatan pembinaan dan pelaporan rutin) X 100%	17%	61%	200,000,000	61%	200,000,000	62%	200,000,000	63%	300,000,000	64%	300,000,000	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		2	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		5	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	

4.3. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel ini memfokuskan pada subkegiatan strategis yang diprioritaskan untuk mempercepat pencapaian sasaran Renstra. Pemilihan subkegiatan dilakukan melalui analisis mendalam terhadap kebutuhan spesifik daerah kepulauan, seperti keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil dan potensi pengembangan olahraga bahari. Contoh subkegiatan unggulan meliputi penguatan kapasitas digital pendidik, pembinaan kewirausahaan pemuda, serta rehabilitasi sarana pendidikan dan olahraga di daerah tertinggal.

Prioritas ini dirancang untuk menjawab tantangan struktural, seperti disparitas kualitas pendidikan antarpulau dan rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan. Dengan memfokuskan sumber daya pada subkegiatan kritis, Dinas Pendidikan dapat memaksimalkan dampak program secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan dalam kerangka pembangunan daerah yang inklusif.

Tabel 4. 3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	

			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
		<i>terlaksananya pengelolaan pendidikan dasar secara merata tingkat pengelolaan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</i>	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Pembangunan Laboratorium	
			Pembangunan Kantin Sekolah	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	

			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
		<i>Tersedianya pengelolaan PAUD tersedianya pengelolaan pendidikan PAUD</i>	<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			Pengadaan Mebel PAUD	
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	

			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
		jumlah PKBM yang melaksanakan kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan		
		Jumlah kurikulum muatan lokal yang disusun	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	

			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidikan dan tenaga pendidikan		
		<i>jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan</i>	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga	
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan		
		<i>jumlah lembaga yang memiliki izin operasional</i>	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda		
		<i>persentase pelaksanaan pengembangan daya saing kepemudaan</i>	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	

			Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING OLAHRAGA	Persentase Atlet yang masuk dalam kejuaraan tingkat provinsi		
		jumlah sekolah Dasar yang difasilitasi sarpras olahraga jumlah sekolah menengah pertama yang difasilitasi sarpras olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
			Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
		persentase jumlah atlit yuang diseleksi dan dibina	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			Seleksi Atlet Daerah	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
		persentase bantuan hibah yang disalurkan pada organisasi olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
		persentase pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang di laksanakan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan		
		<i>Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan</i>	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	
		Jumlah Prasarana dan sarana pramuka tingkat daerah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai alat evaluasi capaian Renstra yang mengintegrasikan tiga pilar utama: peningkatan mutu pendidikan, penguatan kapasitas kepemudaan dan olahraga, serta akuntabilitas tata kelola birokrasi. Setiap indikator, seperti Indeks Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan, disusun berdasarkan target RPJMD dan standar nasional untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan makro.

IKU juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Contohnya, target Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi tolok ukur transparansi dan responsivitas dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya menjadi alat pemantauan internal, tetapi juga instrumen akuntabilitas publik yang transparan.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	3	4	5	6	7	8	8	9	10
1	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	65.10	67.60	70.10	72.60	75.10	77.60	
	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	71.35	72.45	73.55	74.65	75.75	76.85	
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	54.97	57.87	60.77	63.67	66.57	69.47	
	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	62.27	63.77	65.27	66.77	68.27	69.77	
	Harapan Lama Sekolah	Persen	13.2	13.3	13.39	13.49	13.59	13.68	
	Rata - Rata lama Sekolah	Persen	7.62	8.01	8.4	8.8	9.19	9.59	
2	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	69.50	69.52	69.58	69.60	69.63	69.65	
	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	64	65	67	70	73	75	
	Persentase Atlet yang masuk dalam kejuaraan tingkat provinsi	Persen	39	40	45	50	56	70	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Dinas pendidikan pemuda dan olahraga KKA	Nilai	B (63,66)	B (65,34)	B (67,05)	B (68,72)	BB (70,46)	BB (71,86)	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	A(87)	A(87,5)	A(88)	A(88,5)	A(89)	A(89,5)	

4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjabarkan target operasional yang lebih spesifik dan terukur, seperti jumlah peserta didik PAUD, tingkat partisipasi pemuda dalam wirausaha, serta capaian prestasi olahraga. Data baseline digunakan sebagai acuan untuk menetapkan target progresif yang realistis, dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan dan kondisi geografis kepulauan.

IKK dirancang untuk memastikan implementasi program dapat dipantau secara berkala dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan di lapangan. Misalnya, indikator jumlah sekolah yang mengadopsi teknologi digital menjadi refleksi komitmen peningkatan kualitas pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Melalui tabel ini, Renstra tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga panduan dinamis yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persentase anak usia (5-6) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	88.80	91.77	94.31	96.86	99.41	100.00	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah pertama	Persentase Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama / Jumlah anak usia 7-15 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan x 100 %	99.11	99.28	99.44	99.61	99.77	99.94	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan / Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan x 100%	22.57	26.67	30.77	34.87	38.97	43.07	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar / jumlah anak usia 7 - 12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan x 100%	98.93	99.11	99.29	99.47	99.64	99.82	
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persentase Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama / jumlah anak usia 13 - 15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan x 100%	99.54	99.62	99.69	99.77	99.85	99.92	
6	Iklim Keamanan SD	Nilai Iklim Keamanan SD	74.60	75.50	76.40	77.30	78.20	79.10	
7	Iklim Keamanan SMP	Nilai Iklim Keamanan SMP	71.43	72.93	74.43	75.93	77.43	78.93	
8	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai Iklim Kebhinekaan SD	72.05	73.05	74.05	75.05	76.05	77.00	
9	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai Iklim Kebhinekaan SMP	71.11	72.11	73.11	74.11	75.11	76.11	
10	Iklim Inklusivitas SD	Nilai Iklim Inklusivitas SD	60.28	62.78	65.28	67.78	70.28	72.78	
11	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai Iklim Inklusivitas SMP	59.07	61.47	63.87	66.27	68.67	71.07	
12	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	65.10	67.60	70.10	72.60	75.10	77.60	

13	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	71.35	72.45	73.55	74.65	75.75	76.85	
14	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	54.97	57.87	60.77	63.67	66.57	69.47	
15	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	62.27	63.77	65.27	66.77	68.27	69.77	
16	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	36.90	37.31	37.72	38.13	38.54	38.95	
17	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Persentase Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	53.81	54.56	55.31	56.06	56.81	57.56	
18	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Provinsi / Jumlah pemuda (umur 16 - 30 tahun) di kabupaten / kota x 100%	8.44	8.60	8.76	8.92	9.08	9.25	
19	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten / Jumlah pemuda (umur 16 - 30 tahun) di kabupaten/kota x 100%	89.55	91.34	93.13	94.92	96.71	98.50	
20	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga Provinsi dan Nasional	5.00	6.00	8.00	10.00	15.00	20.00	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan. Melalui analisis mendalam terhadap kondisi eksisting, tantangan geografis, serta potensi lokal, Renstra ini memuat arahan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerataan akses pendidikan, penguatan kapasitas pemuda, dan pengembangan olahraga yang berdaya saing.

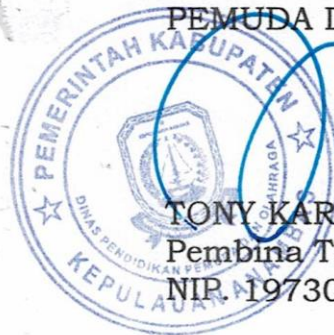
Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis, seperti ketimpangan infrastruktur pendidikan di wilayah kepulauan, rendahnya literasi digital, serta kebutuhan penguatan karakter generasi muda berbasis nilai-nilai positif seperti religiusitas, integritas, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, seluruh upaya pembangunan diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, termasuk peningkatan indeks pendidikan, reformasi birokrasi, dan daya saing daerah.

Keberhasilan implementasi Renstra ini tidak lepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, maupun mitra pembangunan. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mengoptimalkan sumber daya, memperluas jangkauan program, dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara capaian dengan indikator yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai dasar penyusunan perbaikan strategi di masa mendatang.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas optimis dapat mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan

berdaya saing melalui pendidikan berkualitas, pemuda yang berkarakter, serta olahraga yang membanggakan. Renstra ini menjadi bukti komitmen untuk terus berinovasi, adaptif terhadap perubahan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, demi terwujudnya visi *"Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera"*.

Tarempa, 8 September 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA



TONY KARNAIN, Ph.D
Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 19730602 200312 1 013